

Pengaruh Sistem Pelaporan, Kompetensi Perangkat Desa, Kepemimpinan Kepala Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung

I Nyoman Jagra Sujatnika^{1*}, Ni Luh Gede Erni Sulindawati²



^{1,2,3}Program Studi Akuntansi S1, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

jagra.sujatnika@gmail.com Author^{1}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pelaporan, kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan jenis data primer yang diperoleh dari kuesioner dan diukur dengan menggunakan skala likert. Populasi pada penelitian ini adalah perangkat desa serta kelembagaan desa di seluruh desa yang ada di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode non-probability sampling yaitu teknik purposive sampling. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 24.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sistem pelaporan (X1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, variabel kompetensi perangkat desa (X2) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, variabel kepemimpinan kepala desa (X3) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, serta variabel partisipasi masyarakat (X4) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Sistem Pelaporan, Kompetensi Perangkat Desa, Kepemimpinan Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat.

Abstract

Research aims to understand the influence of reporting system, the competence of village officials, the leadership of the village head, and public participation, to successful accountability of village funds Management. The research is quantitative research using types of data on obtained from the questionnaire and primary is measured using likert scales. The population in this study are village officials and village institutions in all villages in Banjarangkan Subdistrict, Klungkung Regency. The sample collection technique use non-probability sampling that is purposive sampling. Data analysis techniques in this study using multiple linear regression analysis with SPSS version 24. The results of the research indicated that the variable reporting system variable (X1) has a positive and significant effect on the accountability of village funds management, the variable competency of the village apparatus (X2) has a positive and significant effect on the accountability of village funds management, the leadership variable of the village head (X3) has an effect on positive and significant effect on the accountability of village funds management, and public participation variable (X4) has a positive and significant effect on the accountability of village funds management.

Keywords: accountability of village funds management, reporting system, the competence of village officials, the leadership of the village head, public participation.

Pendahuluan

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 berkenaan dengan permasalahan desa telah mencerminkan bahwanya desa sudah mengalami perkembangan, dengan demikian memerlukan pemberdayaan dan perlindungan supaya dapat jadi demokratis, mandiri, dan juga kuat. Pengertian desa yang dikutip dari penelitian Sulindawati (2019) menyatakan bahwa "Villages are villages and customary villages or what are called using other names,

Publisher: Undiksha Press

Licensed: This work is licensed under

a Creative Commons Attribution 3.0 License



henceforth called Village, which is a unit of legal community with its borders and has the authority to regulate and manage its administration, the local people's interest based on the initiative of the community, rights of its origin, and / or traditional rights that are recognised and respected in the system of the nation of the Unitary State of the Republic of Indonesia", dalam konteks tersebut, desa dapat diartikan sebagai kesatuan komunitas diatur dalam ketetapan hukum mengenai perbatasan dan juga mempunyai wewenang untuk melakukan pengelolaan dan juga penyusunan dalam masalah pengadministrasian, minat masyarakat setempat berdasarkan padainisiatif masyarakat, hak-hak asalnya, ataupun hak-hak tradisional yang mendapatkan penghormatan dan pengakuan di dalam siste kebangsaan NegaraLKesatuan RepublikLIndonesia. Prioritas pembangunan nasional terhadap pemerintahan sekarang yang memfokuskan dan juga memperkuat daerah pinggiran serta desa membuat pengentasan terhadap desa-desa tertinggal semakin ramai dicanangkan dan juga digalakkan, dalam rangka menopang pelaksanaan proses kegiatan pemerintahan pusat dan juga pembangunan desa membuat program danaGGGdesa pada agar desa dapat berkembang. Pemerintah pusat menganggarkan dana-dana yang tidak kecil untuk setiap tahunnya demi terciptanya pembangunan desa. Desa diberikan kewenangan secara penuh terhadap dana tersebut dalam rangka mengelola potensi yang dimilikinya sehingga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Progam dana desa dari pemerintah pusat telah banyak merubah wajah-wajah desa yang ada di seluruh Indonesia, yang sebelumnya banyak berstatus desa tertinggal menjadi desa berkembang.

Salah satu daerah yang telah berhasil dalam menuntaskan penanganan desa tertinggal adalah Provinsi Bali. Provinsi Bali sendiri ialah salah satu dari semua provinsi yang terdapat pada Negara Indonesia juga memperoleh atau mendapatkan pengalokasian dana desa yang berasal dari penganggaran oleh pemerintah pusat. Alokasi dana desa dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan mengalami jumlah alokasi dana dari pemerintah terus meningkat tidak langsung menjamin bahwa semua dana terserap dengan baik, contohnya adalah di Kabupaten Klungkung yang mengalami permasalahan mengenai pengelolaan dana desa tersebut. Seperti yang terjadi di tahun 2019, dimana pengajuan dana desa tahap III (ketiga) di Kabupaten Klungkung hingga tanggal 30 Agustus 2019 belum bisa dilakukan, karena realisasi serapan dana desa baru 72 persen, sedangkan syarat minimal pengajuan dengan serapan 75 persen (Nusa Bali, 2019). Walaupun banyak desa yang serapan dana desanya telah mencapai 80 - 100 persen, karena persentase 75 persen itu komulatif (seluruh desa), maka desa yang serapannya cepat turut terhambat oleh beberapa desa yang serapannya lambat. Salah satu dari beberapa kecamatan yang akses alokasi dana desa masih ialah kecamatan Banjarangkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem pelaporan, kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, dan partisipasi masyarakat, terhadap akuntabilitas pengelolaan"danaBBdesa. Indikasi dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dapat dicerminkan dari suatu akuntabilitas. Hasil penelitian Nurjaman (2015) menyatakan bahwa kemampuan yang dimiliki oleh para perangkat desa, partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat, dan juga kepemimpinan yang dimiliki oleh kepala desa merupakan beberapa factor-faktor yang membuat berhasilnya pembangunan desa. Suratmi (2014) juga menyatakan bahwa jika pemerintah telah memfokuskan terhadap beberapa permasalahan, misalnya ialah system pelaporan, anggaran dan juga pengendalian akuntansi, maka dapat di katakan pemerintah telah memenuhi akuntabilitas.

Hubungan Antara Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Arta dan Rasmini (2019) menjelaskan bahwa di dalam pengimplementasian anggaran yang sudah dicanangkan, bisa dikendalikan dengan cara menggunakan secara baik

mengenai sistem pelaporan, sehingga akan membuat akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin baik”.

Pemerintah desa yang memiliki peranan dalam pengelolaan berkenaan dengan keuangan desa mempunyai tugas dan kewajiban dalam penyediaan informasi mengenai keuangan dan juga informasi yang memiliki kegunaan untuk pertimbangan dalam proses penentuan keputusan dan juga sebagai yudikatif secara akuntabel dan juga transparan.

System pelaporan ialah rujukan sebagai bentuk deskripsi mengenai system tanggung jawab yang dilakukan oleh bawahan untuk dilaporkan hasil pembangunan kepada atasan. Pemerintah musti dapat memberikan informasi penggunaan keuangan secara akurat, konsisten, relevan serta kredibel. Demi terciptanya akuntabilitas, dalam penyusunan laporan maka pemerintah desa musti memungkinkan transparansinya (Mardiasmo, 2006). Berdasarkan penjabaran di atas, maka diajukan hipotesis pertama sebagai berikut:

H₁: Sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Hubungan antara Penggunaan Kompetensi Perangkat Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi secara harfiah diartikan sebagai wewenang, kemampuan ataupun kemampuan, secara letimologi, kompetensi dapat diterjemahkan sebagai bentuk perilaku seseorang yang mempunyai pengetahuan, keahlian, dan perilaku yang baik dalam dirinya untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Sutrisno, 2009). Keberhasilan pengelolaan dana desa memiliki ketergantungan yang kuat terhadap kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa yang memadai. Karena jumlah dana desa yang diterima desa, dengan demikian dalam pengelolaannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan terkait pengelolaan dana tersebut. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap desa menjadi faktor kunci terhadap pengelolaan dana desa yang baik. Jumlah dana desa yang terlampaui besar harusnya memerlukan kompetensi yang seimbang dari aparatur desa untuk mengatur uang tersebut seefisien mungkin. Penelitian Thomas (2013) menyatakan bahwa masih rendahnya kompetensi yang ada dalam setiap individu dapat membuat terhambatnya pengelolaan dana desa. Berdasarkan penjabaran tersebut, oleh karena itu diajukan hipotesis kedua sebagaimana berikut ini:

H₂: Kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Hubungan antara Kepemimpinan Kepala Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kepemimpinan dalam suatu organisasi dapat menentukan keberhasilan ataupun kegagalan organisasi tersebut (Fathoni dan Rengu, 2015). Saat orang lain terpengaruh oleh satu orang atau individu yang memberikan kekuasaan merupakan bentuk kontrol dari kepemimpinan. Nurjaman (2015) mengungkapkan bahwa peningkatan pembangunan desa memerlukan beberapa faktor penting, yang salah satunya adalah kepemimpinan kepala desa.

H₃: Kepemimpinan kepala desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Hubungan antara partisipasi masyarakat dan akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Mahayani (2017) masyarakat dapat lebih mempercayai program yang dibuat pemerintah desa jika ikut dilibatkan dalam pembangunan, sehingga bisa dikatakan partisipasi masyarakat sangat penting untuk dilibatkan dalam perencanaan pembangunan. Salah satu alasan pengelolaan dana desa memerlukan partisipasi masyarakat adalah karena tujuan dari dana desa tersebut ialah demi pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat tercapai jika masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan desa. Hal tersebut berkaitan terhadap hasil dari penelitian oleh Naimah (2017) yang didapatkan “hasil bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan” desa.

Berdasarkan penjabaran tersebut, dengan demikian diajukan hipotesis yang keempat sebagaimana berikut ini:

H₄: Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa

Metode

Penelitian kuantitatif yang dilaksanakan pada desa-desa yang ada di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Penelitian ini memiliki populasi dengan cakupan yang cukup luas yakni perangkat desa di seluruh Desa se-Kecamatan Banjarangkan, dengan jumlah sampel sebanyak 130 orang. Jumlah sample tersebut ditentukan oleh penulis dengan menggunakan metode *non-probability sampling*, yaitu teknik *purposive sampling*. Adapun kriteria yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah perangkat desa yang terdiri atas; Kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, dan kepala dusun; kelembagaan desa diantaranya; ketua LPM, ketua BPD, dan ketua PKK; serta memiliki masa kerja minimal 1 tahun. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang kemudian diolah dengan menggunakan teknik analisis data antara lain uji statistik yaitu uji statistik deskriptif, uji kualitas data yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, heterokedastisitas, multikolonearitas, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis yaitu uji koefisien determinasi, dan uji t.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dinyatakan bahwa variabel sistem pelaporan (X₁) mempunyai skor minimum 26, skor maksimum 35, skor rata-rata 31,04 dengan standar deviasi 2,696. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai sistem pelaporan terhadap nilai rata-rata sebesar 2,696. Variabel kompetensi perangkat desa (X₂) mempunyai skor minimum 30, skor maksimum 45, skor rata-rata 40,66 dengan standar deviasi 2,697. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai kompetensi perangkat desa terhadap nilai rata-rata sebesar 2,697. Variabel kepemimpinan kepala desa (X₃) mempunyai skor minimum 24, skor maksimum 40, skor rata-rata 34,98 dengan standar deviasi 3,534. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai kepemimpinan kepala desa terhadap nilai rata-rata sebesar 3,534. Variabel partisipasi masyarakat (X₄) mempunyai skor minimum 20, skor maksimum 30, skor rata-rata 27,85 dengan standar deviasi 1,759. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai partisipasi masyarakat terhadap nilai rata-rata sebesar 1,759. Variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) mempunyai skor minimum 24, skor maksimum 30, skor rata-rata 27,15 dengan standar deviasi 1,923. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap nilai rata-rata sebesar 1,923.

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
X ₁	26	35	31,04	2,696
X ₂	30	45	40,66	2,697
X ₃	24	40	34,98	3,534
X ₄	20	30	27,85	1,759
Y	24	30	27,15	1,923

Sumber: *Output SPSS 24.0 for Windows*

Selain uji statistik deskriptif dilakukan juga uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas sebaran data, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Uji validitas dimaksudkan untuk menguji

seberapa baik instrumen penelitian mengukur konsep yang seharusnya diukur. Uji validitas dilakukan dengan nilai *Pearson Correlation* yang didapat dari menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pernyataan dengan total skor. Berdasarkan uji validitas yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa semua pernyataan memiliki nilai *pearson correlation* > daripada 0,3 dan nilai Sig. (2-tailed) korelasi untuk semua item < daripada 0,05 sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan valid. Uji kualitas data selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Reliabilitas dapat diartikan sebagai suatu alat yang dapat mengukur suatu kuesioner yang merupakan statistik dari variabel atau konstruk. Kriteria yang digunakan yaitu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,600 (Ghozali, 2012). Uji normalitas sebaran data digunakan untuk menguji apakah model dalam regresi variabel terikat serta variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Uji normalitas sebaran data dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lainnya, Uji multikolinieritas dapat diuji dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Glejser*. Suatu model regresi akan dikategorikan baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

No.	Variabel	Alpha Cronbach	Standar Alpha	Keterangan
1.	Sistem Pelaporan (X_1)	0,761	0,70	Reliabel
2.	Kompetensi Perangkat Desa (X_2)	0,673	0,70	Reliabel
3.	Kepemimpinan Kepala Desa (X_3)	0,857	0,70	Reliabel
4.	Partisipasi masyarakat (X_4)	0,495	0,70	Reliabel
5.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,686	0,70	Reliabel

Sumber: Output SPSS 24.0 for Windows

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Data

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
<i>Unstandardized Residual</i>		
N		123
<i>Normal Parameters</i>	<i>Mean</i>	0,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	0,86356859
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,092
	<i>Positive</i>	0,066
	<i>Negative</i>	-0,092
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		1,018
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,251

Sumber: Output SPSS 24.0 for

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

<i>Model</i>	<i>Collinearity Statistics</i>		Keterangan
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	
X_1	0,466	2,144	Tidak ada multikolinieritas
X_2	0,536	1,866	Tidak ada multikolinieritas
X_3	0,394	2,536	Tidak ada multikolinieritas
X_4	0,840	1,191	Tidak ada multikolinieritas

Sumber: Output SPSS 24.0 for Windows

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,489	0,899		3,880	0,000
	X ₁	-0,019	0,026	-0,088	-0,718	0,474
	X ₂	0,001	0,023	0,004	0,035	0,972
	X ₃	-0,051	0,022	-0,318	-2,379	0,019
	X ₄	-0,018	0,030	-0,055	-0,596	0,552

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: Output SPSS 24.0 for Windows

Berdasarkan pada table 2 di atas bisa ditinjau bahwa semua variabel independen dan juga variabel dependen mempunyai perhitungan *alpha cronbach* yang lebih dari 0.70. dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa angket kuesioner dari sistem pelaporan (X₁), kompetensi perangkat desa (X₂), kepemimpinan kepala desa (X₃), partisipasi masyarakat (X₄), dan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) adalah reliabel.

Berdasarkan data pada tabel 3, dapat dilihat bahwa nilai *Kolmogorov Smirnov* ditunjukkan bahwa nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0,251. Nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* ditunjukkan lebih besar dari 0,05 untuk statistik *Kolmogorov-Smirnov Z*. Dengan hasil perhitungan data tersebut, dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa sebaran data tersebut berdistribusi normal.

Dalam penelitian ini, Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa di setiap variabel bebas yang digunakan mempunyai, nilai *tolerance* > 0,10 nilai dan *VIF* < 10 . Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ditemukannya multikolinearitas. Berdasarkan hasil pengujian dari heterokedastisitas diketahui bahwa nilai signifikansi antara variabel bebas dengan absolute residual (RES2) lebih besar dari 0,05. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa permodelan regresi ini ada gejala heteroskedastisitas.

Pengujian hipotesis dilakukan dalam rangka memecahkan rumusan masalah yang ada dengan pertimbangan semua uji asumsi klasik telah terpenuhi. Dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan kemudian diujikan dengan cara mempergunakan model regresi linier berganda. Adapun variabel terikat yang digunakan ialah akuntabilitas pengelolaan dana desa. Variabel bebas yang digunakan, antara lain: sistem pelaporan, kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, dan partisipasi masyarakat

Tabel 6. Hasil Analisis Koefisien Beta

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,199	1,489		1,477	,142
	X ₁	0,277	0,043	0,389	6,420	0,000
	X ₂	0,131	0,037	0,197	3,494	0,001
	X ₃	0,191	0,036	0,352	5,344	0,000
	X ₄	0,155	0,049	0,142	3,145	0,002

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Output SPSS 24.0 for Windows

Berdasarkan perhitungan regresi linier berganda, bisa diperhatikan pada dalam Tabel 6, dihasilkan suatu persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon \dots \dots \dots (1)$$

$$Y = 2,199 + 0,277X_1 + 0,131X_2 + 0,191X_3 + 0,155X_4 + \epsilon$$

Setelah itu, proses uji t yang memperlihatkan berapa besaran pengaruh dari pengaruh variabel bebas tunggal terhadap variabel terikat secara parsial. Hasil pengujian hipotesis satu, hal ini memperlihatkan bahwa variabel system pelaporan (X_1) mempunyai signifikansi uji t yang lebih kecil dibandingkan dengan batas error, yaitu $0.000 < 0.05$, dengan demikian H_1 diterima. Oleh karena itu, bisa ditarik kesimpulan bahwa system pelaporan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Hasil dari pengujian hipotesis dua memperlihatkan bahwa kompetensi perangkat desa (X_2) mempunyai signifikansi uji t yang lebih kecil dibandingkan dengan batas error, yaitu $0.001 < 0.05$, dengan demikian H_2 diterima. Oleh karena itu, bisa ditarik kesimpulan bahwa kompetensi perangkat desa (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Hasil dari pengujian hipotesis tiga memperlihatkan bahwa kepemimpinan kepala desa (X_3) mempunyai signifikansi uji t yang lebih kecil dibandingkan dengan batas error, yaitu $0.000 < 0.05$, dengan demikian H_3 diterima. Oleh karena itu, bisa ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan kepala desa (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Hasil dari pengujian hipotesis empat menunjukkan memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat (X_4) mempunyai signifikansi uji t yang lebih kecil dibandingkan dengan batas error, yaitu $0.002 < 0.05$, dengan demikian H_1 diterima. Oleh karena itu, bisa ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat (X_4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y).

Uji hipotesis selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi, koefisien determinasi digunakan mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Pada penelitian ini, Koefisien determinasi ialah dengan menggunakan nilai dari *Adjusted R2*. Hal ini disebabkan oleh nilai *Adjusted R2* bisa saja mengalami kenaikan dan penurunan jika variabel independen baru dimasukkan ke dalam model.

Tabel 7. Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,894	0,798	0,792	0,878

a. Predictors: (Constant), X_1 , X_2 , X_3 , X_4

Sumber: *Output SPSS 24.0 for Windows*

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa koefisien determinasi sebesar 0,798. Hal ini menunjukkan bahwa 79,8% variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh variabel sistem pelaporan, kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, dan partisipasi masyarakat, sedangkan 20,2% dipengaruhi oleh faktor lain.

Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis pertama mengenai pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan nilai koefisien regresi 0,277 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,000. Dengan demikian, menunjukkan bahwa sistem pelaporan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y), sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Sistem pelaporan merupakan laporan anggaran yang merinci macam-macam prestasi dari anggaran berdasarkan faktor yang menjadi penyebab anggaran itu sendiri dan unit organisasi yang bertanggung jawab atas anggaran tersebut (Anthony, 2000). Ada beberapa indikator yang mempengaruhi sistem pelaporan yang berkualitas antara lain prinsip pertanggungjawaban, prinsip pengecualian, prinsip perbandingan, prinsip akuntabilitas, dan prinsip manfaat.

Prinsip pertanggungjawaban mencerminkan suatu lingkup yang jelas serta dapat dimengerti oleh pembaca laporan. Prinsip pengecualian, berkaitan dalam melaporkan hal-hal penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban, misalnya perbedaan-perbedaan antara realisasi dan target, atau penyimpangan-penyimpangan dari rencana karena adanya suatu alasan tertentu. Prinsip perbandingan, merupakan suatu ukuran yang dapat memberikan gambaran keadaan masa yang dilaporkan dibandingkan dengan periode atau unit lain. Prinsip akuntabilitas, merupakan prinsip yang mensyaratkan untuk melaporkan hal-hal yang dominan membuat sukses dan gagal. Prinsip manfaat, merupakan prinsip yang mengkehendaki bahwa suatu laporan harus mempertimbangkan manfaat dan biayanya. Secara umum terdapat tiga tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah yaitu transparansi, akuntabilitas, serta manajerial. Menurut Kusumaningrum (2013) jika suatu pengelolaan oleh suatu organisasi telah sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada maka hal tersebut dapat diartikan sebagai definisi dari akuntabilitas .

Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis yang kedua mengenai pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan nilai koefisien regresi 0,131 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,001. Dengan demikian menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y), oleh sebab itu hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Kompetensi merupakan kapasitas dari individu, lembaga, atau sistem dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya secara efisien dan juga efektif agar meraih tujuan yang sudah dicanangkan (Sugiarti dan Yudianto, 2017). Penelitian ini menggunakan indikator untuk mengukur kompetensi yang dijelaskan dalam Sutrisno (2009: 204) antara lain minat (*interest*), sikap (*attitude*), nilai (*value*), kemampuan (*skill*), pemahaman (*understanding*), dan juga pengetahuan (*knowledge*). Pengetahuan (*knowledge*) ialah semacam suatu kesadaran kognitif dalam melakukan pembelajaran sesuai kebutuhan perusahaan. Pemahaman (*understanding*), merupakan kedalaman kognitif yang dimiliki oleh setiap orang dalam memahami kondisi dan karakteristik pekerjaan secara efisien dan efisien. Kemampuan (*skill*), merupakan suatu kapasitas yang didapat dari teori maupun praktek langsung dan dikembangkan oleh individu yang bersangkutan. Nilai (*value*), merupakan acuan untuk perilaku seseorang. Sikap (*attitude*), merupakan tindakan emosional setelah mendapat suatu perlakuan dari luar. Minat (*interest*), merupakan ketertarikan seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Kompetensi pada umumnya memuat beberapa perilaku kunci yang penting untuk melaksanakan peran dalam mewujudkan kerja dengan prestasi yang memuaskan (Sutrisno, 2009). Kompetensi dapat dimaknai dalam berbagai bidang seperti pengetahuan, kemampuan, serta keterampilan yang dapat dipelajari melalui pendidikan serta pelatihan yang berupa pengetahuan konseptual dan kegiatan kerja.

Hasil dari penelitian terdahulu yang mempertegas hasil penelitian ini yakni penelitian yang dilaksanakan oleh Ladapase (2019) menyatakan bahwa individu yang memiliki kompetensi tinggi serta sudah mengemban jabatan yang sesuai kemampuannya akan lebih baik dalam menyelesaikan tugas yang diemban.

Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis ketiga mengenai pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan nilai koefisien regresi 0,191 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,000. Dengan demikian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y), maka hipotesis ketiga.

Menurut Riva'i (2003:3) mengemukakan bahwa kepemimpinan ialah serangkaian proses dalam lingkup suatu kelompok yang tujuannya adalah untuk memberi arahan atau mempengaruhi orang lain, dalam konteks kekuasaan. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi kepemimpinan, antara lain kemampuan dalam pengambilan keputusan, kemampuan dalam memberikan motivasi, kemampuan komunikasi, kemampuan mengendalikan bawahan, tanggung jawab, serta kemampuan mengendalikan emosi. Kemampuan dalam pengambilan keputusan merupakan suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Kemampuan dalam memberikan motivasi, merupakan keahlian dalam memberikan dorongan sehingga anggota mampu memberikan kinerja terbaik. Kemampuan komunikasi, merupakan kemampuan untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap penting dalam suatu organisasi. Kemampuan mengendalikan bawahan, artinya pemimpin harus mempunyai *power* dalam mempengaruhi bawahan. Tanggung jawab, artinya pemimpin harus mampu menjadi seseorang yang selalu ada saat terjadi kesalahan yang menyangkut organisasi yang dipimpinnya. Kemampuan mengendalikan emosi adalah kontrol pribadi terhadap perasaan yang sedang dialami oleh seorang pemimpin. Kepemimpinan pada umumnya selalu melibatkan orang lain, yang meliputi bawahan maupun pengikut tanpa terkecuali.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis keempat mengenai pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan nilai koefisien regresi 0,155 dengan nilai signifikansi uji *t* sebesar 0,002. Dengan demikian memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat (X_4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y), sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Partisipasi masyarakat merupakan suatu kesadaran dari dalam setiap individu untuk terus mengikuti perkembangan pembangunan desa agar mencapai taraf hidup yang lebih baik.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa indikator-indikator dari partisipasi, diantaranya adalah partisipasi terhadap pelaksanaan kegiatan, partisipasi terhadap keputusan pengambilan tindakan, partisipasi terhadap evaluasi dan pemantauan pembangunan, dan juga partisipasi terhadap hasil dari pemanfaatan pembangunan (Mardikanto dan Poerwoko 2015). Partisipasi terhadap keputusan pengambilan tindakan, berarti masyarakat mengikuti perkembangan setiap program pembangunan. Partisipasi terhadap pelaksanaan kegiatan dapat diartikan sebagai partisipasi yang menyangkut tenaga fisik khususnya dalam hal pembangunan. Partisipasi terhadap evaluasi dan pemantauan pembangunan, merupakan kegiatan pemantauan pada pembangunan yang akan ataupun yang sedang dilakukan. Partisipasi terhadap hasil dari pemanfaatan pembangunan adalah partisipasi dalam memanfaatkan dengan baik pembangunan fasilitas ataupun infrastruktur yang dibuat oleh pemerintah desa.

Simpulan

Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa (1) variabel sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan memperlihatkan nilai koefisien regresi 0,277 dengan nilai signifikansi uji *t* sebesar 0,000, dengan demikian dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa hipotesis pertama diterima. (2) Variabel kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan memperlihatkan nilai koefisien regresi 0,131 dengan nilai signifikansi uji *t* sebesar 0,001, dengan demikian dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa hipotesis ketiga diterima. (3) variabel kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan

dana desa dengan memperlihatkan nilai koefisien regresi 0,191 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,000, dengan demikian dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa hipotesis ketiga diterima. (4) variabel partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan memperlihatkan nilai koefisien regresi 0,155 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,002, dengan demikian dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa hipotesis keempat diterima.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah desa dapat meningkatkan sistem pelaporan yang lebih baik, dapat memaksimalkan dengan baik kompetensi-kompetensi yang ada pada setiap individu, dapat mengoptimalkan kualitas dari tata cara kepemimpinan, serta selalu melibatkan partisipasi masyarakat. Saran yang dapat diberikan kepada peneliti yang akan datang ialah bahwa peneliti dapat menggunakan yang tidak dipergunakan ataupun juga menambahkan variabel independen lain, misalnya dengan penambahan variabel bebas transparansi.

Daftar Pustaka

- Anthony, R.N., Dearden, dan Bedford. 2000. Sistem Pengendalian
- Arta, I Made Agus Suma dan Ni Ketut Rasmini .2019 “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa“. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.26.1.
- Fathoni, M., & Rengu, S. P. 2015. “Dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi di Desa Denok Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol. 3, No. 1.
- Gatra. 2019 “Pengamprahan dana desa tahap iii belum bisa dilakukan” . Tersedia pada <https://www.nusabali.com/berita/58483/dana-desa-tahap-iii-belum-bisa-diamprah> (diakses tanggal 20 Desember 2019)
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Undip Nurjaman, R. 2015. “Dinamika dan Problematika Implementasi UU Desa: Pembelajaran dari Daerah di Jawa Barat”. Jurnal Desentralisasi. Vol. 13, No. 1.
- Kusumaningrum, D. A. dan S. N. Rahardjo. 2013. “Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan Deviden, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan”. Diponegoro Journal of Accounting. Vol. 2, No. 4.
- Ladapase, Lalita Ivana Maria. 2019. Pengaruh Kompetensi Aparatur, Motivasi Aparatur, dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Nelle, Kecamatan Koting, dan Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka. Skripsi Sarjana Ekonomi Progam Studi Akuntansi pada Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Yogyakarta.
- Mahayani, N. L. A. 2017. “Prosocial Behavior Dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana”. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis. Vol. 12, No. 2.
- Mardiakanto, Totok dan Soebiato Poerwoko.2015. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Mardiasmo. 2006. “Perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik melalui akuntansi sektor publik: suatu sarana good governace”. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Vol. 2, No.1, Mei 2006.

- Naimah. 2017. “Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai”. Tesis Magister Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Riva’i. 2009. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiarti, E dan Yudianto. 2017. “Analisis faktor kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi penganggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Survei pada desa-desa di wilayah kecamatan klari, kecamatan karawang timur, kecamatan majalaya dan kecamatan rengasdengklok kabupaten karawang). Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice.
- Sugiyono. 2010. Statitika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.Manajemen.Edisi kelima. Jakarta: Erlangga.
- Sulindawati, Luh Gede Erni. 2019. “*The Implementation of a Village Financial Administration Teaching Model through Microsoft Excel Program*”. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. Volume 5, Issue 6, 2019.
- Suratmi, N. T. H. 2014. “Pengaruh Audit Kinerja, Penyajian Laporan Keuangan, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Pada Akuntabilitas Publik”. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansiprogram S1. Vol 2
- Sutrisno, E. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana.
- Thomas. 2013. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tuding”. *Journal Pemerintahan Integratif*.Vol. 1.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa